

**LEMBAR JAWABAN
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 18

Nama Assessee : M. Ikhsan AB

Tanggal : 10 Pebruari 2022

Di dalam menghadapi kebocoran data kependuduk di Indonesia, maka pemerintah berkewajiban untuk dapat melindungi data kependuduk dari penggunaan data dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan data pribadi yang tidak benar juga bisa merugikan kepada orang yang datanya di gunakan oleh orang lain, seperti penipuan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Maka dari itu pemerintah harus mengeluarkan peraturan peraturan untuk penggunaan data kependudukan tersebut, agar kerahasian dari data pribadi seseorang tersebut dapat di lindungi.

Misalkan di dalam pengurusan pembuatan kartu keluarga, pelayanan kesehatan, perbankan, pelayanan pendidikan, pembayaran pajak, pembuatan SIM dan lain-lain yang menggunakan data pribadi seseorang harus ada satu aplikasi yang usser dan password nya hanya pemilik data tersebut yang tau. mencakup semua pelayanan tersebut sehingga masyarakat tidak terlalu repot kesana kemari, jika ada satu aplikasi yang mencakup semua itu masyarakat akan sangat terbantu dan lebih aman.

Sehingga pada waktu kita diperlukan data kita akan dengan mudah ditemukan dan efesiensi waktu lebih cepat.

Dalam pelayanan terhadap masyarakt kita juga akan dimudahkan dan kita tidak perlu lagi ketemu dan bertatap muka karena sudah ada data kependudkan yang kita inginkan.

Maka dari itu jika menggunakan satu aplikasi yang mencakup banyak pelayanan tersebut akan lebih aman dan lebih terjamin dari kebocoran data sehingga masyarakat dapat lebih tenang.